

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Program pembangunan ekonomi berkelanjutan bertumpu pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan berdasarkan pada mekanisme pasar dan berbasis pada sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang produktif dan mandiri. Program prioritas pembangunan ekonomi meliputi program-program jangka pendek untuk percepatan pemulihan ekonomi dan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama dua dasawarsa ini, sedangkan prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk membangun landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut diperlukan dukungan dan program-program pembangunan perwilayahan; pemantapan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; peningkatan keterpaduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan perwilayahan; serta program-program di bidang ketahanan pangan. Untuk meningkatkan daya saing dan terciptanya struktur perekonomian yang kuat diperlukan investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara makro, sedangkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan terbukti bahwa sektor pertanian, industri kecil, dan menengah tahan terhadap gejolak ekonomi. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang berkaitan dengan sektor tersebut tetap akan menjadi prioritas.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyeraskan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan

Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah. Dalam tahun-tahun mendatang, agenda pembangunan ekonomi daerah akan didominasi oleh program desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Tujuan program ini jauh lebih luas dari pembangunan ekonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan rasa keadilan, mengembangkan partisipasi rakyat dan suatu sistem sosial-politik yang demokratis, serta untuk menjaga dan memperkuat kesatuan bangsa. Tujuan-tujuan di atas ingin ditampung dalam UU No 22/1999 dan UU No 25/1999. Pola desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat memenuhi semua tujuan itu tidak mudah untuk dirancang, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kerancuan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah keraguan untuk memberikan otonomi pada daerah kabupaten dan kota.

Pengalihan kewenangan ke daerah kabupaten/kota menjanjikan pengembangan partisipasi rakyat dalam pembangunan sistem yang semakin demokratis. Tetapi pelaksanaan otonomi di daerah kabupaten/kota untuk beberapa tahun mendatang, belum tentu menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien karena pengembangan kebijakan dan pembangunan kelembagaan dan kemampuan di banyak daerah kabupaten/kota akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Lemahnya pengembangan kebijakan serta kelembagaan dan kemampuan di daerah sangat tampak dari minimnya prakarsa dan usulan-usulan yang datang dari daerah untuk melaksanakan program desentralisasi dan otonomi. Pada waktu lalu, pembangunan daerah digagaskan dan dilaksanakan terutama oleh pusat dan saat sekarang terdapat gejala bahwa proses desentralisasi juga akan diselenggarakan secara tersentralisasi.

Ketidakterdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003).

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup mengembirakan, namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Ini diperlihatnya masih banyaknya kantong-kantong kemiskinan di daerah pedesaan, terutama untuk wilayah pesisir. Menurut Herlian Saleh (2007) jumlah penduduk miskin di Riau sebesar 22,18 persen.

Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan pembangunan Daerah Riau melalui program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Program K2I ini mengacu kepada Lima Pilar Utama pembangunan Daerah Riau sebelumnya, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil.

Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Daerah Riau mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi seperti hutan, perikanan, pertanian dan lainnya. Selain kaya akan sumberdaya alam, daerah ini juga memiliki potensi kawasan yang sangat strategis, karena sebagian besar daerahnya dilalui oleh jalur internasional yakni Selat Malaka sehingga menjadi dekat dengan pusat perdagangan internasional, yaitu Batam, Singapura dan Malaysia. Atas dasar ini, maka salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi Daerah Riau adalah menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat secara cepat, dinamis, terintegrasi dan bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal atas dasar keunggulan secara komparatif dan kompetitif.

Tumbuhkembangnya perekonomian masyarakat selain bertumpu pada kekuatan sumberdaya alam yang dimiliki, sumberdaya manusia dengan kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi yang baik, juga ditentukan sejauh mana rancangan pembangunan yang dibuat oleh pihak pemerintah daerah sendiri menjadi tepat guna dan berhasil guna. Program pembangunan yang terancang secara sistematis dengan prioritas-prioritas yang telah terukur dengan jelas, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan dan kemajuan daerah secara menyeluruh. Kerja keras seluruh aparatur pemerintahan dan partisipasi penuh seluruh lapisan masyarakat sangat dituntut untuk pencapaian tujuan tersebut.

Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan (koperasi) sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk kebijakan pengembangan lembaga ekonomi melalui koperasi guna untuk mengetaskan kemiskinan di daerah pedesaan Riau.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana percepatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan model pengentasan kemiskinan dan pemetaan lembaga ekonomi berbasis agribisnis di daerah pedesaan.

pedesaan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rencana strategis pengentasan kemiskinan dan pemetaan lembaga ekonomi melalui koperasi berbasis agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah pedesaan. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan mengetaskan kemiskinan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berkaitan dengan kegiatan ini, beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun perumusan model Pengentasan Kemiskinan dan Pemetaan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, yaitu:

1. Seberapa besar potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis agribisnis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Daerah Riau.
2. Seberapa besar potensi perekonomian daerah, yang terkait dengan struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan.
3. Bagaimanakah perumusan model pengentasan kemiskinan dan pemetaan kelembagaan ekonomi yang berbasis agribisnis di Daerah Riau.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengentasan kemiskinan melalui pemetaan lembaga ekonomi koperasi berbasis agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah pedesaan di Kabupaten/kota, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan strategi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan model pengentasan kemiskinan dan pemetaan lembaga ekonomi berbasis agribisnis di daerah pedesaan
2. Menentukan potensi perekonomian daerah, yang menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang

- berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan yang berbasis agribisnis.
- Sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan acuan utama bagi dinas/instansi di Kabupaten/kota dalam menyusun program-program pembangunan jangka panjang dan menengah.

1.4. Keluaran Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan program pembangunan ekonomi khususnya untuk daerah pedesaan, dan secara khusus keluaran penelitian ini adalah:

- Penyediaan informasi tentang potensi perekonomian daerah pedesaan, antara lain menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
- Penyediaan informasi tentang subsektor yang potensial pada berbagai sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis agribisnis di daerah pedesaan.
- Penyediaan informasi tentang faktor internal dan eksternal yang menopang pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan.
- Tersusunnya rancangan pembangunan ekonomi pedesaan dalam rangka mengetaskan kemiskinan di Daerah Riau.
- Semua informasi dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam ilmu pembangunan pedesaan, dimana pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian yang lebih spesifik terutama menyangkut dengan pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian. Diharapkan juga berguna sebagai pengetahuan praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat melahirkan minimal 2 (dua) artikel ilmiah yang dimuat di jurnal terakreditasi.

1. Jurnal 'Eksekutif (terakreditasi), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT, Surabaya.
2. Jurnal Ekonomi (terakreditasi), PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
3. Jurnal Sosiohumaniora (terakreditasi), Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan buku ajar sebagai referensi bagi mahasiswa yaitu Ekonomi Pembangunan, Strategi Percepatan Pembangunan Pedesaan.

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan adanya berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu (Mudradjat Kuncoro, 2000): *Pertama*, mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Ide tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan. Alternatif cara yang dapat digunakan untuk memobilisasikan tenaga kerja adalah: menyusun kerangka lembaga di pedesaan yang memungkinkan untuk memberdayakan tenaga kerja pedesaan, *Kedua*, mensosialisasikan pada transfer sumberdaya pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar, sehingga terjadi mobilisasi ekonomi pedesaan, *Keliga*, menyoroti pesatnya pertumbuhan pada sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor pemimpin. Model ini dikenal dengan model berbasis teknologi (*Rural-Led Development*). Sektor pertanian tidak hanya sebagai pemasok